

MENYIMAK KEHIDUPAN KELUARGA “MISKIN”

Ninik Handayani ¹

Abstract

POVERTY criteria must include various aspects (widely and comprehensively), with specific valuation standard. This argument is based on case study of poor families in Java. Using observation and interview method, found three groups of poor family, namely 1) The factual poor family; 2) The well-off but considered poor; and 3) The poor but considered well-off. A number of poverty aspects occurred to poor families are: income, consumption, education, health, powerlessness in public domain, inability to voice their aspiration, and the low quality of human capital. In the current local autonomy era, to prevent the gap between the rich and poor, the role of local elites with objectivity and pro-poor attitude should be encouraged.

(**Keywords:** Poverty, Poor family, Local elite)

Pendahuluan

APAKAH miskin itu? Apa pula kemiskinan itu? Kata-kata miskin dan kemiskinan hampir selalu menjadi alasan (bahkan dikategorikan penghambat) pembangunan. Orang-orang miskin sering dihubungkan atau berkorelasi dengan masalah keamanan, karena mereka yang miskin diibaratkan sebagai orang yang kelaparan dan karena itu, untuk memperoleh sesuap nasi sebagai pengisi perut, mereka cenderung melakukan tindakan kriminal (mencuri). Apakah benar kaum miskin menjadi penghambat pembangun-

an atau merusak keamanan? Indikator pembangunan sering kali dikaitkan dengan data-data tentang kemiskinan.

Miskin atau kemiskinan mempunyai nilai jual atau posisi tawar yang tinggi. Dalam kenyataannya, kemiskinan menjadi kata kunci untuk melaksanakan program besar pembangunan yang justru menguntungkan penguasa (elite). Program pembangunan pengentasan kemiskinan semakin gencar tatkala angka kemiskinan penduduk Indonesia cukup tinggi. Angka kemiskinan tahun 2006 meningkat sekitar dua persen ² dari tahun sebelumnya.

¹⁾ Penulis adalah staf Percik, Salatiga di bidang penelitian yang menyangkut aspek politik lokal, sosial-ekonomi-budaya di tingkat masyarakat. Bekerja sebagai Redpel & Sekretaris Renai (Jurnal Kajian Politik Lokal & Sosial-Humaniora). Saat ini penulis sedang menyelesaikan tesis S2, Magister Studi Pembangunan di UKSW Salatiga.

²⁾ Jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2006 sebanyak 39,05 juta (17,75%) dan pada Februari 2005 sebanyak 35,10 juta (15,97%). Sebagian besar penduduk miskin (63,41%) berada di pedesaan (Timotius, 2007 dalam Handout kuliah Otonomi Daerah 2007).

Hampir semua bidang (sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan) mengarah kepada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat miskin, sehingga tersedia banyak dana yang berupa subsidi atau bantuan untuk kaum miskin. Akibatnya, masyarakat berusaha mencari label miskin guna memperoleh bantuan itu. Mereka tidak segan-segan mencari surat bukti miskin dari RT sampai kelurahan/desa untuk mendapatkan label miskin, padahal kehidupan mereka termasuk layak atau mereka bisa dikatakan orang mampu.

Lalu, siapakah yang disebut miskin? Apakah yang tergolong miskin adalah mereka yang termasuk dalam indikator kemiskinan yang antara lain: (1) pendapatan yang rendah, berdasarkan GNP kurang dari dua dolar Amerika perhari atau pendapatan di bawah UMR; atau (2) tempat tinggal yang dinilai tidak layak huni (misalnya, tidak mempunyai rumah atau ukuran rumah sangat kecil, berlantai tanah, tidak mempunyai WC, dinding kayu/bambu)? Apakah yang tergolong miskin itu adalah mereka para pengemis di jalanan, para janda/jompo, orang yang tidak mempunyai pekerjaan, atau yang bekerja di sektor informal, dan lain-lain? Apakah benar mereka yang menerima bantuan (BLT, asuransi kesehatan, raskin) dari pemerintah semuanya miskin? Ternyata guna memberi label miskin itu tidak mudah karena kenyataannya sangat rumit memberi batasan yang tegas.

Tulisan ini mengulas kehidupan sosial, ekonomi, dan politik keluarga miskin. Kehidupan sosial yang dimaksud adalah gambaran tentang pekerjaan dan kegiatan yang menjadi sumber penghidupan. Aspek

ini sering dijadikan indikator dan perumusan kriteria bagi penerima program bantuan miskin. Kehidupan ekonomi yang kami maksud adalah situasi penghasilan atau perolehan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga. Sedangkan kehidupan politik kami batasi hanya pada situasi posisi tawar mereka dalam proses pengambilan keputusan di arena publik.

Informasi bersumber dari enam kasus keluarga miskin yang digali melalui wawancara dan pengamatan.

Gambaran Keluarga Miskin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), miskin adalah tidak berharta benda atau serba kurang. Sementara menurut Soekanto (1993: 338-339), kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidaksesuaian penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang terjadi secara terus-menerus dengan waktu relatif lama seiring dengan ritme kehidupan sehari-hari dan akan mempengaruhi tingkat konsumsi, kesehatan, dan proses pengambilan keputusan. Kemiskinan dapat terjadi karena unsur budaya (internal dan eksternal), atau akibat dari keadaan yang luar biasa (misalnya bencana/musibah).

Ada tiga kasus kehidupan keluarga miskin yang dipaparkan menurut nama informan kunci, dua kasus menurut kepala keluarga, dan satu kasus lagi menurut jenis kegiatan yang menjadi sumber penghidupan. Ke-enam kasus itu masing-masing mewakili kehidupan keluarga pembantu rumah tangga, keluarga janda yang mendiami *rumah singgah* (Ampera), keluarga kuli pasar, keluarga buruh rendahan di

perusahaan swasta, keluarga buruh cuci, dan keluarga pengemis.

Kehidupan Keluarga Suyati (30 tahun)³ – Pembantu Rumah Tangga

Suami Suyati (40 tahun) adalah tukang becak yang *mangkal* di sekitar halte Salatiga. Suyati bukan asli dari Salatiga. Ia mengenal suaminya, ketika menjadi pembantu rumah tangga dan sering bertemu di pangkalan becak dekat rumah majikannya. Setelah berumah tangga, mereka tinggal bersama orang tua suami di Salatiga. Keluarga ini mempunyai seorang putra berumur tujuh tahun, yang duduk di kelas satu SDN Salatiga.

Mertua Suyati, hanya mertua laki-laki, bukanlah orang mampu. Bapaknya sudah tua, tidak bekerja, dan hidupnya dari bantuan orang lain. Rumah yang ditempati adalah milik kakak iparnya yang tinggal di Jakarta. Kakaknya yang membangun rumah itu yang kemudian dikontrak oleh mahasiswa. Di bagian belakang rumah disisakan dua kamar, yang sekamar ditempati oleh keluarganya dan kamar lain untuk bapaknya. Satu kamar berukuran (3x3)m terasa sempit dan agak sulit mengatur ruangan menjadi rapi. Keluarga ini tinggal di ruangan itu dengan perabotan sebuah almari kaca, sebuah tempat tidur besi, dan televisi kecil. Ruangan itu pun dipakai untuk menyimpan barang-barang, kecuali kompor minyak yang

diletakkan di emperan kamar dan becak diparkir di halaman. Walaupun hanya satu ruangan, ia tetap bersyukur, karena tidak harus menyewa. Secara sepintas keluarga ini tidak terlihat miskin, karena kamar tersebut menjadi bagian bangunan rumah yang bertembok dan berlantai keramik. Akan tetapi, sebenarnya kehidupan mereka terpisah dengan penghuni rumah yang telah dikontrak orang lain.

Penghasilan tukang becak lumayan, rata-rata perhari dari hasil menarik becak dapat memperoleh uang jasa Rp. 10.000,00-20.000,00. Bila dinilai secara nominal, jumlah tersebut cukup untuk belanja kebutuhan keluarganya, akan tetapi pengaruh budaya tukang becak di sekitar pangkalan yang gemar main kartu dan membeli lotere (nomor) mengakibatkan uang untuk belanja berkurang. Suyati menceritakan bahwa suaminya bila mendapat tarikan lebih banyak, maka sebagian uang itu dibelikan nomor. Meskipun Suyati sudah mengingatkan, tetap saja tidak dihiraukan oleh suaminya. Kalaupun diingatkan terus, suaminya akan marah dan ia yang berbadan kecil takut dipukul⁴ oleh suaminya yang berpostur tinggi.

Suaminya memberi uang belanja Rp 10.000,00-15.000,00 perhari kepada istrinya. Padahal ia harus membayar kursus komputer anaknya di sekolah Rp 7.500,00 perbulan dan memberi uang saku sekolah Rp 2.000,00 per hari. Uang yang diperoleh

³) Wawancara dengan Suyati dilakukan di rumahnya pada hari Rabu, 10 Oktober 2007 jam 16.00-16.30

⁴) Suyati dikaruniai anak setelah empat tahun menikah. Ia menikah umur 19 tahun dan sekarang anaknya berusia tujuh tahun. Sebelum mempunyai anak, suaminya jarang memberi uang dan bila suaminya kalah main judi atau marah, maka Suyati sering dipukuli. Semenjak mempunyai anak, suaminya jarang marah dan dinilai cukup memperhatikan keluarga.

juga untuk membayar air, listrik, dan kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan makan bapaknya.

Untuk menutupi kebutuhan keluarga, Suyati yang hanya bersekolah⁵ dasar dua tahun, bersedia bekerja serabutan. Ia menyadari kekurangan dirinya yang tidak mempunyai ketrampilan, sehingga hanya bisa mengandalkan tenaganya. Setiap pagi, setelah anaknya berangkat sekolah dan suaminya narik becak, ia bekerja di rumah tetangga, yaitu membantu pekerjaan rumah tangga selama sekitar tiga jam. Menjelang anaknya pulang sekolah ia pun pulang. "Daripada menganggur, pekerjaan itu cukup membantu keuangan", kata Suyati. Terkadang ia diminta tetangga untuk mencuci atau menyetrika pakaian, membersihkan rumah, mencuci piring di tempat orang hajatan, dan lain-lain. Ia dibayar secara sukarela dan terkadang diberi makanan oleh anak kost atau tetangga. Di bulan puasa, ia juga menerima zakat fitrah dari tetangganya yang mampu.

Di lingkungan RT tempat tinggalnya, sebenarnya terdapat beberapa keluarga yang termasuk kurang mampu⁶. Karena itu, bantuan dari pemerintah berupa beras miskin (raskin) dibagi rata, sehingga masing-masing KK perbulan memperoleh jatah beras empat kilogram dengan membayar Rp 6.000,00. Selain raskin, mereka menerima asuransi kesehatan keluarga miskin yang dapat berobat gratis di RSU, dan bantuan

subsidi BBM (BLT, yang sekarang sudah tidak ada). Bagi Suyati, bantuan tersebut sangat berarti, karena anaknya yang terkena *flek* (penyakit paru-paru) mendapat pengobatan gratis. Sedangkan uang BLT dapat dibelikan televisi. Kehidupan dengan kondisi semacam itu telah dijalani selama bertahun-tahun.

Dalam bermasyarakat, Suyati hanya mengikuti kegiatan PKK di lingkungannya. Kegiatan lain tidak diikutinya, kecuali mendapat undangan. Biasanya ia diundang tetangga yang mempunyai hajat untuk membantu di dapur. Sedangkan untuk kegiatan yang menyangkut musyawarah pembangunan, ia tidak pernah diundang. Misalnya, dalam penentuan raskin, ia tidak mengetahui proses musyawarahnya. Yang diketahuinya adalah seperti yang dijelaskan ketua RT bahwa raskin dibagi rata ke semua KK, karena banyak warga RT yang membutuhkan. Suyati dan suaminya menerima saja keputusan hasil rapat RT apa adanya tanpa harus hadir atau mempertanyakan alasannya.

Kehidupan Keluarga Mbah Bari (80 tahun)⁷ - Janda di Rumah Singgah

Bari bukanlah namanya, tapi nama anak laki-lakinya. Semua orang di sekitar tempat tinggalnya memanggil dan mengenalnya sebagai Mbah Bari. Ia tinggal di Ampera sejak tahun 1970-an bersama ketiga anaknya. Suaminya meninggal kira-kira 10 tahun

⁵ Suyati tidak dapat menamatkan pendidikan dasar, karena orang tuanya adalah buruh tani yang tidak mampu membiayai sekolah. Ia disuruh orang tuanya menjaga adiknya, sehingga rela tidak bersekolah, yang kemudian menjadi pembantu rumah tangga.

⁶ Mereka menjadi tukang becak, tukang batu, atau buruh cuci. Namun, tidak semuanya bersedia bekerja di rumah orang lain.

⁷ Wawancara dengan Mbah Bari dilakukan di rumahnya pada hari Kamis, 11 Oktober 2007 jam 10.00-10.30

yang lalu.

Ampera adalah sebutan dari *ampiran* atau rumah singgah, sebuah lokasi pemukiman yang dibangun oleh Dinas Sosial pada tahun 1970-an sebagai tempat penampungan para tuna wisma yang mangkal di pasar Salatiga (Tamansari). Bangunan pemukiman dibuat tiga blok berderet, dan di antara kedua deret terdapat aula yang dipakai untuk ruang tamu dari Dinas Sosial atau instansi lain yang menjenguknya. Sebagian besar yang tinggal di Ampera adalah para pemulung, pengemis, dan *rosok-rosok* (pengumpul barang bekas).

Sebenarnya yang mempunyai jatah rumah singgah itu adalah Bari (si anak). Saat itu Mbah Bari masih mengontrak karena belum mempunyai rumah sendiri. Anaknya menawarnya untuk tinggal di rumahnya yang sekarang ditempati. Sekarang rumah itu disekat-sekat dengan tripleks sebagai tempat tinggal anaknya yang lain dan cucunya yang sudah berkeluarga. Anaknya, Bari, ikut program transmigrasi ke Sumatra di awal tahun 1980-an. Kini status rumah itu bisa menjadi hak milik dan bersertifikat.

Kondisi rumah Mbah Bari yang berding tripleks terlihat lebih rapi dibandingkan dengan tetangganya. Rumah itu memiliki tiga ruangan, yaitu ruang tamu, kamar, dan dapur. Beberapa pot bunga diletakkan di teras. Di ruang tamu terdapat satu set kursi kayu (meskipun agak rusak), almari pakaian kecil, televisi, dan *dispenser* yang ditata rapi. Lantai semen dilapisi dengan alas plastik.

Pekerjaan Mbah Bari membuat kerupuk gendar dari tepung tapioka yang dijual di

pasar Salatiga. Dari pasar ia membawa pakaian yang kemudian dikreditkan ke tetangga sekitarnya. Selain itu ketiga anaknya bekerja, dan ia sering mendapat kiriman uang atau barang (misalnya TV, *dispenser*) dari anaknya.

Tinggal di Ampera secara otomatis diberi label miskin. Lokasi pemukiman itu sering mendapat bantuan dari pemerintah maupun tetangga di sekitarnya. Bantuan pemerintah selain raskin⁸, Askes, BLT, bazar sembako murah, juga ada penampungan air bersih, dan perbaikan jalan (betonisasi) sepanjang jalan pemukiman. Bantuan dari tetangga, baik individu atau kelompok, berupa bantuan biaya pendidikan sekolah, sedekah, atau zakat.

Di sela-sela kegiatannya membuat krupuk, Mbah Bari juga rajin beribadah di masjid dan mengikuti pengajian. Mbah Bari tidak mengenyam pendidikan, tidak melek huruf, dan kurang bisa berbahasa Indonesia. Sebagian besar warga di Ampera menjadi pengemis dan pemulung, tetapi Mbah Bari tidak mau melakukan hal yang sama. Ia merasa dirinya masih bisa bekerja dan tidak mau meminta belas kasihan orang lain (atau mengemis). Walaupun hidupnya pas-pasan, Mbah Bari mampu beramal Rp. 50.000,00 yang diberikan untuk pembangunan masjid, bahkan ia pun dapat membeli kambing untuk disembelih di hari raya Idul Adha.

Kehidupan Keluarga Kirah(49 tahun)⁹ – Kuli Pasar

Sejak sore hujan turun dengan deras disertai dengan petir. Hujan mulai reda pada

⁸⁾ Mbah Bari menerima jatah raskin sebanyak delapan kilogram beras dengan membayar Rp. 13.000,00 perbulan.

⁹⁾ Data ini diambilkan dari fieldnote penulis (Ninik Handayani) tanggal 3 April 2004 (pukul 19.00-

pukul 19.00. Di ujung gang terletak rumah Kirah yang jalannya masih tanah dan setelah tersiram air hujan menjadi sangat licin. Di depan rumah itu ada sumur yang dipagari dengan bambu. Rumahnya berada di tengah-tengah kebun dengan pohon-pohonan cukup rimbun, bahkan di dekat sumur ada serumpun pohon bambu.

Kirah menempati rumah berdinding papan, berlantai tanah, dan bukan miliknya sendiri. Ia *ngindung* (menumpang rumah di halaman milik orang lain) dari tetangga yang kasihan kepadanya. Saat memasuki rumahnya, ada sepasang meja tamu dan dua kamar yang ditutup kelambu. Tidak terdengar suara TV atau pun radio.

"*Nuwun sewu, Bu, panggenane kados mekaten, sami trocoh* (maaf Bu, tempatnya seperti ini, banyak yang bocor)," kata Kirah sambil membetulkan kursi. Ketika saya ke rumahnya sekitar pukul 19.00 WIB, ia sedang berbaring, tapi belum tidur dan mempersilakan saya masuk. Ia ditemani anak perempuannya¹⁰.

Kirah bukanlah asli orang Desa Suruh; ia berasal dari Ungaran. Ia hanya mengenyam pendidikan SD satu tahun (kelas 1). Pergi ke Desa Suruh lantaran ikut membantu Bu Manten Lurah Noto (mantan Kepala Desa Suruh) sampai akhirnya kenal dengan suaminya (Sumadi) di Desa Suruh. Setelah menikah, ia mencoba berusaha di Pasar Suruh dengan menjual rambut panjang. Namun, usaha itu tidak berlangsung lama karena waktu itu ada

wig dan konde yang sudah jadi, sehingga peminat rambut panjang sedikit. Akhirnya ia bersama suaminya menjadi buruh *junjung* (angkutan) di Pasar Suruh. Dengan gerobak ia siap mengantarkan barang, baik di Pasar Suruh maupun mengantarkan belanjaan sampai ke rumah orang yang meminta tolong. Tahun 2001 suaminya meninggal dan sejak itu ia harus berusaha sendiri menjadi buruh *junjung* di Pasar Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang.

Kirah berada di rumah menjelang maghrib. Pagi-pagi ia pergi ke Pasar Suruh membantu pedagang membuka *dasaran*. Setelah itu siap membawakan barang belanja bagi orang yang membutuhkan jasanya sebagai buruh *junjung*. Menjelang maghrib, Kirah pulang ke rumahnya. Ia melakukan pekerjaan ini karena inilah pekerjaan yang telah lama digeluti bersama suaminya. Berpindah ke jenis pekerjaan lain kurang memungkinkan karena ia telah dikenal masyarakat sebagai buruh angkut di pasar. Namun, bila ada tawaran dari tetangga yang membutuhkan tenaganya (misalnya, menanak nasi dan merebus air dengan perapian kayu), ia pun bersedia membantunya.

Penghasilan sebagai buruh tentu pas-pasan. Ia tidak mempunyai posisi tawar untuk menentukan besar upahnya. Kirah akan menerima berapapun uang yang diberikan sebagai buruh jasa angkut. Tentang penghasilannya, Kirah tidak memberi jawaban nominal uang. Ia hanya berkata, "*Poko*

19.30), data penelitian Pilihan Pemilih pada Pemilu 2004 di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang.

¹⁰ Kirah seorang janda yang sendiri di rumah. Kadang ia ditemani anak bungsu perempuan yang menikah dengan laki-laki asal Desa Beji, Kecamatan Suruh. Menantunya juga bekerja sebagai buruh dan belum mempunyai rumah, sehingga kadang-kadang berada di Desa Suruh atau di Desa Beji.

cekap kangge nedo” (pokoknya cukup untuk makan).

Indikator asal tidak lapar atau sekadar perut kenyang memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Kehidupan Kirah hanyalah menunggu fajar untuk bekerja dan melihat maghrib untuk beristirahat. Tidak ada waktu bagi Kirah untuk mengikuti arisan, pertemuan warga, atau hanya mengobrol dengan tetangga. Sering tetangganya memberi uluran tangan berupa pakaian pantas pakai untuk dirinya atau cucunya, makanan seadanya, uang sekadarnya, dan selalu mendapatkan zakat fitrah dari warga ataupun masjid.

Tentang kesehatan, Kirah bersyukur karena diberi kesehatan. Bila sakit pun, hanya sakit ringan dan ada program pengobatan gratis di semua Puskesmas Kabupaten Semarang. Sedangkan program pemerintah berupa raskin dan BLT, ia juga menerimanya. Karena Kirah tinggal di lingkungan RT I RW VI, Dusun Mesu, Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, maka dikategorikan sebagai keluarga yang sangat miskin.

Kehidupan Keluarga Yayak (50 tahun) – Buruh Cuci

Yayak yang berpendidikan SMEA tinggal di sekitar kampus Salatiga. Pekerjaannya adalah buruh cuci anak-anak kost dan terkadang menjadi tukang masak bila diminta tetangga. Suaminya membuka bengkel sepeda motor tetapi usahanya itu sepi, sehingga hampir tidak berpenghasilan. Untuk menghabiskan waktu, suaminya sering pergi memancing dan ikan hasil pancingannya adalah lauk mereka.

Yayak mempunyai tiga anak yang sudah lulus SLTA, tapi semuanya belum mem-

punyai pekerjaan. Rumah yang ditempati lumayan bagus (bangunan tembok dan berlantai keramik) dan berukuran cukup besar. Rumah itu warisan orang tua Yayak yang dibangun dari uang warisan mertuanya, bahkan uang warisan itu masih cukup untuk membangun rumah di sebelahnya yang kemudian dikontrakkan.

Dalam pengamatan selintas, keluarga Yayak tergolong cukup. Akan tetapi, ketiga anaknya yang belum berpenghasilan cukup merepotkan keluarga. Terlebih penampilan anak-anaknya tidak menampakkan kalau orang tuanya susah. Mereka punya sepeda motor, memelihara burung, dan ada pot-pot bunga. Bahkan Yayak juga bergabung dalam berbagai kelompok kegiatan (PKK, arisan RT, dasa wisma, posyandu, pengajian).

Kehidupan ekonominya tutup lubang, gali lubang. Yayak berani hutang untuk keperluan besar (seperti beli sepeda motor, memperbaiki rumah) karena merasa punya *jagan* (sewa rumah) untuk membayar hutang. Padahal untuk makan sehari-hari cukup kesulitan, karena mengandalkan dari buruh cuci. Yayak mendapat bantuan program kemiskinan (raskin, BLT, dan Askes) karena suaminya digolongkan pengangguran yang dianggap kurang mampu. Selain itu, rumah Yayak berdekatan dengan ketua RT dan ia pun aktif dalam kegiatan formal (PKK, RT, Posyandu). Dengan demikian, ia mempunyai akses terhadap penentu kebijakan (ketua RT) untuk dapat menjadi penerima bantuan program kemiskinan.

Kehidupan Keluarga Mak Parli (55 tahun) – Buruh Rendahan di Perusahaan Swasta

Mak Parli menjadi juru masak di sebuah

kantor swasta. Ia tinggal bersama suaminya di Salatiga. Suaminya adalah buruh tani dan *nggadoh* (memelihara) seekor sapi. Sebenarnya Mak Parli dibayar Rp 500.000,00 perbulan. Akan tetapi, suaminya tidak dapat diharapkan penghasilannya, terlebih ia menanggung anak laki-laknya yang bekerja sebagai buruh dan sudah mempunyai seorang anak yang ditinggal ibunya. Mak Parli harus banting tulang guna mencukupi keluarga dan membiayai sekolah cucunya di TK Kanisius.

Melihat penghasilan Mak Parli yang termasuk cukup/layak, maka ia tidak mendapat bantuan¹¹ BLT dan Askes. Namun, menyimak tanggungan keluarga yang ada di pundaknya, penghasilan itu tidak memadai. Selain untuk kebutuhan hidup, ada tuntutan sosial untuk bermasyarakat (misalnya, terlibat dalam PKK, arisan, *nyumbang*). Lalu, bagaimana Mak Parli mengatur keuangan?

Mak Parli bukan tipe yang suka dikasihani, bahkan ia sangat takut hutang kalau diperkirakan dirinya tidak bisa membayarnya. Ia menyesuaikan pengeluaran dengan penghasilan dan menerima apa adanya dengan tinggal di rumah kontrakan

berdinding papan, berlantai tanah, dan listriknya meminjam tetangga.

Kehidupan Keluarga Pengemis

Pusat perhatian pengamatan ini adalah pada seorang pengemis yang tinggal di Ampera (tetangga Mbah Bari). Ia adalah laki-laki pengemis yang cukup gagah, tinggi, kurus, dan kulitnya hitam. Lengkap dengan topi ia sering terlihat mengemis di sepanjang jalan, mulai dari sekitar rumah sampai dengan pertokoan pasar Salatiga. Tangannya selalu menengadahkan dan *njawil* (menyenggol) kepada hampir semua orang yang dilewatinya (mahasiswa, pembeli di toko, pejalan kaki). Bahkan ia tidak segan-segan menekan bel rumah yang dilewatinya untuk mengemis.

Menarik untuk disimak, pengemis tersebut terkadang berangkat ke pasar diantar oleh anak perempuan (remaja) dengan sepeda motor shogun berwarna hijau. Ia beroperasi di Pasar Blauran. Sore hari saat pulang, pengemis itu terlihat santai dengan menjinjing pisang ambon besar dan tas berisi belanjaan. Bahkan ia tidak canggung dan malah tersenyum bila berpapasan dengan orang yang tahu bahwa dirinya pengemis.

Menurut cerita Mbah Bari, tetangganya:

“Orang itu pekerjaannya minta-minta. Ia malas bekerja, karena disuruh transmigrasi tidak mau. Penghasilan pengemis lebih banyak daripada saya. Yang mengherankan, ia berani memberi jatah kepada kedua anaknya yang sudah berkeluarga dan menganggur masing-masing sebesar Rp 10.000,00 perhari dan Rp 100.000,00 menjelang lebaran. Perabotannya juga lebih lengkap daripada saya, tapi saya tidak iri dan tidak ingin seperti dia yang mengemis. Biarlah saya seperti ini, asal tidak mengemis.”

¹¹⁾ Mak Parli hanya berdiam diri ketika keluarganya tidak mendapat BLT. Ia bercerita, “Padahal keluarga lain yang lebih mampu darinya mendapatkan BLT. Konon, mereka yang mendapat BLT adalah yang dekat dengan keluarga ketua RW. Ada subyektivitas dari ketua RW, karena keluarga penjaga makam yang lebih miskin dari Mak Parli juga tidak mendapat BLT”.

Menyimak Kehidupan Keluarga “Miskin”

Berdasarkan paparan di atas, jelaslah bahwa keluarga yang digolongkan “miskin” adalah mereka yang memperoleh bantuan dari pemerintah, misalnya raskin, BLT, atau Askes. Apakah mereka benar-benar miskin, atau hanya berlabel miskin? Bagaimanakah sebenarnya yang dikategorikan miskin? Apakah yang berlabel miskin pasti miskin, atau yang terlihat berkecukupan tapi miskin, atau miskin tapi berkecukupan?

Keluarga miskin dapat dipilah menjadi: (1) keluarga yang benar-benar miskin, (2) keluarga berkecukupan yang dipandang miskin, dan (3) keluarga miskin yang dianggap berkecukupan. Berikut rinciannya:

Keluarga yang benar-benar miskin

Ciri keluarga yang benar-benar miskin antara lain: tidak mempunyai aset ekonomi (aspek ekonomi), bekerja di sektor informal yang digolongkan dalam kelas menengah ke bawah (aspek sosial), dan tidak mempunyai posisi tawar (aspek politik).

Lemahnya aspek ekonomi dapat diketahui dari indikator tidak memiliki tempat tinggal sendiri (diberi, *ngindung*, numpang), tempat tinggal yang kurang layak huni, berpenghasilan harian atau pendapatan hari ini untuk hari ini sehingga hampir tidak mempunyai tabungan, serta membutuhkan bantuan orang lain. Aspek ekonomi berkorelasi dengan aspek sosial, karena status sosial diindikasikan dengan jenis pekerjaan dan penghasilan yang diterimanya.

Dalam ilmu sosial kontemporer, penghasilan, pekerjaan, dan status merupakan konsep-konsep sentral dalam analisis

stratifikasi sosial (Elster, 2000:171). Karl Marx mengajarkan bahwa sarana produksi menentukan jenis ekonomi masyarakat, kebudayaan, dan struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. Sementara dasar ekonomi mempengaruhi struktur politik dan sosial budaya (Soekanto, 1993:xvii-xviii). Pengikut Karl Marx memberi definisi tentang konsep kelas sebagai harus mempertimbangkan kriteria pemilikan, penindasan (bisa diabaikan), perilaku pasar, dan dominasi (Elster, 2000:172).

Jenis pekerjaan sebagai buruh atau tukang dianggap marjinal/terpinggirkan, karena tidak mempunyai aset (pemilikan), posisi tawar rendah (perilaku pasar dan dominasi). Posisi tawar yang rendah, menurut Karl Marx, adalah karena buruh menjual tenaga kerjanya dan kelas kapitalis membeli tenaga kerja. Selain itu terdapat hubungan *patron-klien*, yaitu buruh atau tukang menjadi *klien* dan sangat tergantung dari *patron* yang dianggap mempunyai modal. Konsep kelas dapat menjadi efektif bila ada suatu teori perjuangan kelas, yaitu memperjuangkan mereka untuk memiliki ikatan bersama (Elster, 2000: 173).

Keluarga berkecukupan yang dipandang miskin

Kriteria kemiskinan dapat dilihat dari bangunan fisik tempat tinggal. Berdasarkan kriteria JPS-BK (Jaminan Pengaman Sosial-Bidang Kesehatan) rumah ber dinding tembok, berlantai keramik, mempunyai jamban sendiri termasuk kelompok cukup/kaya. Keluarga Yayah adalah contoh keluarga berkecukupan yang dipandang miskin, memiliki rumah sendiri, sepeda motor, mampu terlibat dalam kegiatan sosial, dan mampu

nyai akses terhadap arena publik.

Situasi miskin yang dihadapi keluarga Yayah adalah kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Keluarga ini lebih mementingkan gaya hidup daripada pemenuhan kebutuhan pokok. Label miskin diperoleh sebagai hasil kedekatannya dengan elite lokal (ketua RT) dan situasi pekerjaan kepala rumah tangga yang hampir berstatus pengangguran. Keluarga ini memanfaatkan peluang memperoleh label miskin untuk mendapatkan bantuan.

Contoh lainnya adalah keluarga penge-mis. Keluarga ini mampu memenuhi kebutuhan pokok seluruh anggotanya. Keluarga ini dianggap miskin karena tempat tinggalnya berada di pemukiman yang telah ditetapkan sebagai daerah tempat tinggal kelompok miskin oleh pemerintah setempat. Mendapat label miskin ternyata menguntungkan. Banyak bantuan mengalir kepada kaum yang dianggap miskin ini. Tidak heran apabila orang menilai bahwa taraf kehidupan ekonomi pengemis lebih baik daripada buruh.

Dua contoh keluarga berlabel miskin tersebut menunjukkan bahwa ternyata “miskin” menjadi sesuatu yang “indah”. Artinya label kemiskinan menjadi sebuah iklan komersial. Memang jarang orang yang mau menjadi miskin, tetapi banyak orang yang menikmati hidupnya sebagai orang miskin. Bahkan mereka rela mendapat label miskin demi mendapatkan kemudahan ekonomi. Parameter pengemis dan pengangguran divonis sebagai status sosial yang rendah, sehingga sering mendapat prioritas untuk menerima bantuan. Padahal status sosial rendah belum tentu miskin, melainkan kurangnya kemauan mereka

untuk mengubah atau menaikkan status sosialnya.

Keluarga miskin yang dianggap berkecukupan

Keluarga yang masuk dalam kelompok ini perlu mendapat perhatian. Mereka berpenghasilan tinggi namun tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, karena penghasilan itu dibagi-bagi menjadi bagian yang banyak (jumlah tanggungan besar) sehingga perolehan ke masing-masing menjadi sedikit. Clifford Geertz menamai hal itu sebagai kemiskinan yang dibagi-bagi (*shared poverty*), yaitu menjadi miskin karena terbatasnya sumber daya (penghasilan).

Selain itu, aspek kekuasaan juga berpengaruh terhadap pengambil kebijakan. Proses sosialisasi/pelaksanaan program pemerintah biasanya melalui birokrasi formal, dan kekuasaan di tingkat bawah adalah ketua RT/RW. Kasus perlakuan terhadap keluarga Mak Parli yang diukur dari nominal penghasilan yang cukup besar dengan status sosial baik (pekerja tetap) menunjukkan kekurangadilan penguasa (elite) terhadap masyarakat. Kekuasaan mendominasi kebijakan yang berpandangan subyektif, sehingga memunculkan raja-raja kecil di tingkat lokal (penguasa lokal).

Kaitan Kemiskinan dengan Otonomi Daerah

Kemiskinan mendorong para ilmuwan sosial melakukan penelitian. Beberapa penyebab kemiskinan menurut hasil survai LBSH NTB (2005) dan Morell (lihat Susanto, 1979:109-110) adalah (1) Sebagian besar masyarakat kelompok ini kurang “melek

huruf” atau berpendidikan rendah. Karena tiadanya biaya pendidikan, atau daerah terisolasi, dalam ukuran keahlian mereka termasuk kelompok *unskilled* yang menempati stratifikasi keahlian paling bawah; (2) Masalah rawan pangan. Rawan pangan dapat berarti kekurangan pangan atau kurang makanan bergizi karena ketiadaan bahan atau ketidaktahuan tentang gizi. Hal ini berpengaruh terhadap kesehatan dan kecerdasan, (3) Adanya pengangguran dan pendapatan rendah. Sebagian besar mereka berpendidikan rendah, kurang ketrampilan, dan tidak mempunyai usaha sehingga sulit bersaing kerja atau menempati stratifikasi keahlian yang lebih tinggi¹²; (4) Kekurangan sumber daya lokal (misalnya air bersih, pangan lokal) sangat mempengaruhi kebutuhan hidup. Bila kebutuhan dasar hidup belum terpenuhi, maka akan sulit mencapai kebutuhan hidup yang lebih tinggi.

Di era otonomi daerah, kemiskinan merupakan salah satu tantangan ketidakadilan sosial (Timotius, 2007:5). Banyak program pemerintah menggunakan kemiskinan sebagai obyek model pembangunan daerah. Otonomi daerah telah membuka ruang partisipasi dalam program pembangunan untuk mewujudkan kebutuhan publik yang tepat sasaran, sehingga dapat meminimalisasi kebocoran atau penyimpangan.

Dalam kenyataannya, program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan hanya menjadi model konseptual dan sulit diwujudkan dalam realita. Hasil penelitian Seknas FITRA di berbagai wilayah menunjukkan bahwa kebijakan APBD belum

memberikan gambaran yang jelas keberpihakan pemerintah dan legislatif kepada rakyat miskin. Ada kecenderungan rakyat miskin akan terabaikan karena alokasi belanja bagi keluarga miskin masih minim (2,37%) dibanding alokasi belanja aparatur sebesar 35,7% dan belanja untuk kepentingan publik sebesar 64,27% (Sucipto, Yenny, 2006:114-115).

Di tingkat lokal, kebijakan program kemiskinan dapat dimainkan oleh elite lokal. Hasil wawancara dan pengamatan kepada keluarga “miskin” di atas menunjukkan bahwa kelompok keluarga yang benar-benar miskin tidak mempunyai waktu untuk turut terlibat dalam pengambilan keputusan di arena publik. Sebaliknya kelompok elite menggunakan akses dan kekuasaan yang dimilikinya untuk terlibat di arena publik ini. Hal itulah yang memungkinkan munculnya dominasi di dalam proses pengambilan keputusan, dan tentunya keputusan-keputusan itu cenderung diarahkan agar lebih menguntungkan pihak mereka sendiri.

Penutup

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang rumit dan memiliki banyak matra. Ia tidak saja berkenaan dengan rendahnya pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik (*powerlessness*), ketidakmampuan menyampaikan aspirasi (*voicelessness*), dan rendahnya mutu hidup manusia (*human development*).

¹²⁾ Stratifikasi keahlian, kecakapan, dan ketrampilan dipilahkan ke dalam urutan dari rendah ke tinggi adalah: *unskilled*, *semi-skilled*, *skilled*, *semi-professionals*, *professionals*, dan *elite*.

Keluarga “miskin” dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok: (1) keluarga yang benar-benar miskin. Biasanya keluarga yang benar-benar miskin menerima apa adanya (tidak mempunyai posisi tawar), takut berhutang, mau bekerja keras, dan tidak mempermasalahkan keputusan publik. Kelompok ini perlu dilibatkan dalam sosialisasi program, baik ekonomi (materi) maupun pendidikan politik, agar para elite lokal tidak mempermainkannya, (2) keluarga yang mampu tapi dianggap miskin. Kelompok ini biasanya lebih mementingkan individualisme. Terlebih bagi yang mempunyai akses publik, mereka akan memanfaatkannya demi keuntungan dirinya. Dalam hal ini bantuan tidak harus berwujud materi, dan (3) keluarga miskin tapi diang-

gap mampu. Kelompok ini mempunyai kehidupan yang setara dengan kelompok keluarga yang benar-benar miskin, karena *resources* (penghasilan) yang dinilai besar harus dibagi-bagi sehingga porsi yang diterimanya berkurang. Kekuasaan elite lokal harus mendapat perlawanan atau ada kontrol, agar program tepat sasaran.

Akhirnya, penentuan kriteria miskin atau batasan kemiskinan haruslah mencakup berbagai aspek (luas dan menyeluruh) dengan memperhatikan standar penilaian yang khusus. Agar tidak terjadi kesenjangan yang semakin besar antara yang miskin dan kaya, peranan elite lokal yang objektif dan berpihak kepada rakyat miskin sangatlah diperlukan.

Daftar Rujukan

- Elster, Jon. 2000. *Karl Marx: Marxisme-Analisis Kritis. Sebuah Analisis Kritis Tokoh Historis Pengguncang Dunia. Perlukah Kita Menolak Komunisme?* Jakarta: Penerbit Prestasi Pustakaraya.
- Handayani, Ninik. 2004. *Field-note* Kirah dalam Pilihan Pemilih pada Pemilu 2004. Salatiga: Percik (tidak dipublikasikan).
- Khadafi, Ucok Sky dan Yenny Sucipto. 2006. *Membangun Gerakan Pro-poor Budget*. Jakarta: Seknas FITRA.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Astrid, 1999. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Timotius, K.H., 2007. “Aspek Lingkungan dari Otonomi Daerah dan Aspek Kemiskinan dalam Otonomi Daerah.” *Handout* Mata kuliah Otonomi Daerah, Studi Pembangunan-UKSW (tidak dipublikasikan).